

OPEN ACCESS

Citation: Dahiri. (2023). Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 312-331

Received: September 5, 2023
Revised: October 31, 2023
Accepted: November 7, 2023
Published: November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

PENGARUH ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH, ANGKA PARTISIPASI KASAR, DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI

The Effect of Education Function Budget on School Enrolment Rate, Gross Enrolment Rate, and Net Enrolment Rate

Dahiri

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta

email: dahiridai@gmail.com

Abstract

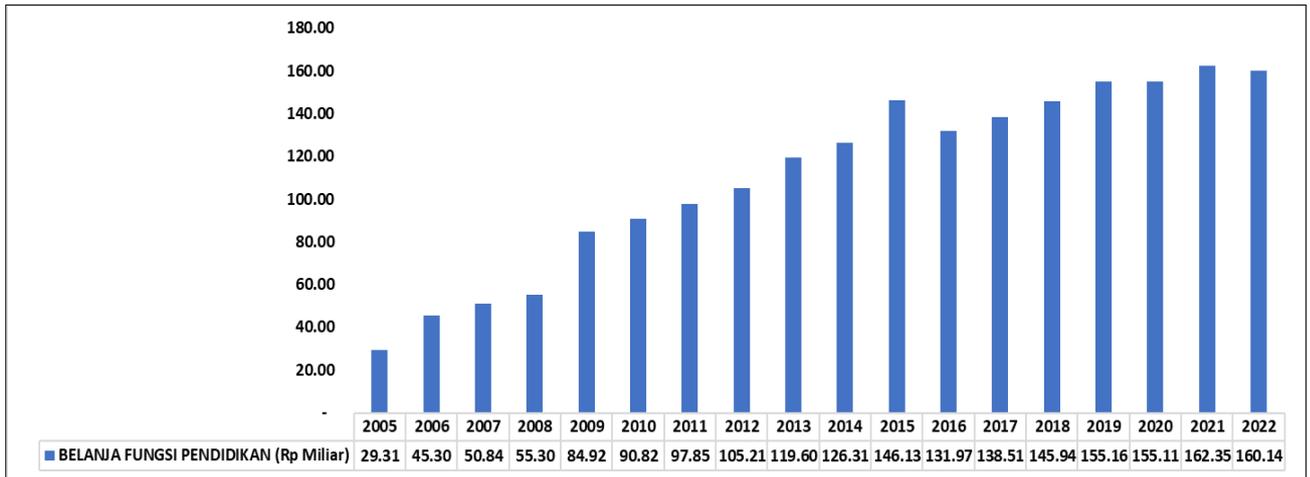
The education function budget over the period 2005–2022 has continued to increase. However, the school enrollment rate has decreased with age. Therefore, this paper aims to analyze the effect of the education function budget on the school enrollment rate, gross enrollment rate, and net enrollment rate. The research method in this study uses a quantitative research approach with a regression model. The results showed that first, the education function budget has a positive and significant effect on APS, APK, and APM. Second, APK SM/MA and APK PT are still below the target. Third, the APM disparity at the SD/MI level does not show inequality in access to education between men and women. Even at the levels of junior secondary school, senior secondary school, and tertiary level (19–24 years old), female APM is higher than male. Therefore, the government's efforts to improve education development include increasing scholarships for children from poor families and prioritizing budget support for improving facilities and infrastructure at the primary and vocational levels for sanitation.

Keywords: budget, school enrollment rates, gross enrollment rates, net enrollment rates

JEL Classifications: I28; I38; H11.

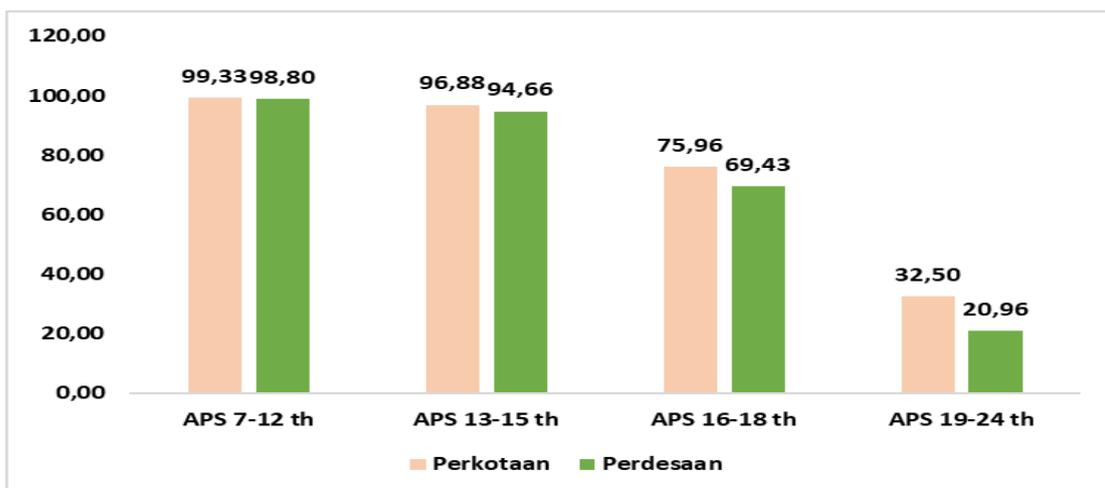
I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Memperhatikan peran strategis ini, maka anggaran pendidikan menjadi *mandatory spending* sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran fungsi pendidikan selama periode 2005-2022 terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya APBN, dari Rp29 triliun tahun 2005 menjadi Rp160,14 triliun (Gambar 1).



Gambar 1. Belanja Fungsi Pendidikan
 Sumber: LKPP Periode Tahun 2005-2022, diolah.

Total anggaran fungsi pendidikan selama periode 2005-2022 sebesar Rp2.000,79 triliun. Dengan besarnya anggaran tersebut, maka anggaran fungsi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan nasional. Namun, akses pendidikan yang salah satunya tercermin dari angka partisipasi sekolah mengalami penurunan seiring bertambahnya usia baik di perkotaan maupun di pedesaan (Gambar 2). Hal ini senada dengan hasil penelitian Farida *et al.* (2021) bahwa semakin besar usia, maka tingkat partisipasi pendidikan semakin menurun. Karena itu dampak anggaran fungsi pendidikan belum diketahui seberapa besarnya.



Gambar 2. APS Menurut Klasifikasi Wilayah
 Sumber: BPS, 2022, diolah.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menganalisis pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap APS, APK, dan APM. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian tentang hubungan anggaran pendidikan dan akses pendidikan. Hayati dan Rutfiana (2020) meneliti Analisis Pengaruh Pemberian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Variabel yang digunakan adalah dana BOS dan APK jenjang SD, SMP, dan SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana pendidikan BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA. Sedangkan jenjang SD dan SMP tidak signifikan. Sedangkan dalam penelitian ini, variabel anggaran menggunakan anggaran fungsi pendidikan dan indikator pendidikan menggunakan APS, APK, dan APM nasional dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi dan usia 7-24 tahun. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap APS;
2. Menganalisis pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap APK; dan
3. Menganalisis pengaruh anggaran fungsi pendidikan terhadap APM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan sejumlah uang yang dialokasikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan dan *education for all* guna mendapatkan pengajaran yang bermutu untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Amanat Undang-Undang dasar 1945 ini sekaligus membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya belum semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua atau masyarakat (Arwildayanto et al., 2017).

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Arifah, 2018).

Pendistribusian anggaran pendidikan juga menjadi hal yang perlu dicermati di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai memiliki tanggung jawab paling besar terhadap pendidikan, namun hanya mendapat kurang dari seperlima dari jumlah anggaran pendidikan. Dengan adanya faktor desentralisasi dan keberagaman di Indonesia yang terdiri dari 540 kabupaten kota 34 provinsi juga menyumbangkan sedikit banyak akan konsekuensi output yang berbeda pula. Oleh karena itu perlu segera dilakukan pendekatan persepsi dan pemahaman kepada kepala-kepala dinas di daerah agar pemanfaatan dan penggunaan anggaran pendidikan tidak melenceng jauh daripada yang dimaksudkan oleh konstitusi. Jadi anggaran pendidikan yang besar ini bukan seperti pepatah “ada uang ada barang”, tetapi lebih menuntut kepada bagaimana cara kita mengaturnya (Ali, 2017).

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Dengan menggunakan konsep dasar penganggaran pembiayaan yang memuat karakteristik, prinsip dan fungsi anggaran

pendidikan dengan menerapkan standarisasi dalam penganggaran biaya pendidikan. Standarisasi dimaksudkan sebagai suatu batasan yang objektif tentang jenis, jumlah, dan mutu sumber daya yang dibutuhkan unit kerja pada tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Wakhid, 2020). Karena itu, proses pengalokasian anggaran perlu lebih meningkatkan dijalankannya prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, peduli pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan visi strategis (Fahmi, 2017).

2. Indikator Pembangunan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang dapat memacu daya saing bangsa di era global. Sebagai investasi produktif, pendidikan dinilai dapat meningkatkan kualitas SDM sebagai faktor pendukung utama untuk meningkatkan produktivitas nasional di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Memasuki abad ke-21, upaya pembangunan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat dalam menyiapkan kualitas SDM. Tantangan tersebut terasa semakin berat sejak adanya otonomi pendidikan karena tidak semua kabupaten/kota mampu memberikan data yang valid dan terpercaya ke pusat. Dari sisi ukuran, kemampuan dan kepentingan sistem pendidikan, keadaan pembangunan pendidikan dapat diikuti perkembangannya melalui penjabaran kebijakan pembangunan pendidikan yang terdiri dari lima misi pendidikan dan kebudayaan. Misi Pendidikan Nasional terdiri atas M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik (Pratiwi, 2018).

Indikator pendidikan untuk misi 2 terdiri dari tiga jenis, yaitu akses meluas, akses merata, dan akses berkeadilan. Akses meluas terdiri dari 4 indikator, yaitu 1) rasio siswa per kelas (R-S/K), 2) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK), 3) persentase perpustakaan (% Perpus), dan 4) persentase laboratorium (% Lab). Akses merata terdiri dari 4 indikator, yaitu 1) angka partisipasi murni (APM), 2) angka partisipasi kasar (APK), 3) tingkat pelayanan sekolah (TPS) dan 4) angka masukan murni (AMM) (SD), angka masukan kasar, atau angka melanjutkan (AM) (SMP dan SM). Akses berkeadilan terdiri dari 3 indikator, yaitu 1) perbedaan gender APK (PG APK), 2) indeks paritas gender APK (IPG APK), dan 3) % siswa swasta (%S-Swt). Dengan demikian, misi 2 menggunakan 11 indikator (Pratiwi, 2018). Sementara itu, Badan Pusat Statistik menggunakan indikator pembangunan pendidikan diantaranya yaitu:

- a. Angka Partisipasi Sekolah dengan kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun).
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan kelompok APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SM/MA, atau APK PT.
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) dengan jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SM/MA: usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun

Penyelenggara pendidikan harus memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan

serta gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, serta peningkatan ekonomi masyarakat (Endaryono dan Djuhartono, 2017).

3. Dampak Anggaran Pendidikan Terhadap Akses Pendidikan

Penelitian terkait tentang hubungan anggaran pendidikan dan akses pendidikan sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa orang diantaranya yaitu:

- a. Hasil penelitian Rohman dan Ferina (2015) menunjukkan bahwa belanja pendidikan, belanja ekonomi dan belanja pelayanan umum tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.
- b. Hasil penelitian Dwianto et al. (2022) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik tingkat SD/MI maupun Tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi fluktuasi namun cenderung menurun.
- c. Prianty dan Fathony (2019) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri se-Kecamatan Solokan Jeruk.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data terdiri dari anggaran fungsi pendidikan, APS, APK, dan APM selama periode 2005-2022. Adapun sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linear dengan persamaan umum yaitu:

$$Y = C + \beta X \dots\dots\dots(1)$$

Dengan Y adalah variabel dependent, X variabel independent, dan β koefisien variabel. Berdasarkan model umum tersebut, maka model dalam penelitian ini dibagi menjadi yaitu:

1. Model Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APS

APS terdiri 4 (empat) kelompok yaitu:

$$Y_1 = C + \beta X \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_2 = C + \beta X \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_3 = C + \beta X \dots\dots\dots(4)$$

$$Y_4 = C + \beta X \dots\dots\dots(5)$$

Dengan X adalah anggaran fungsi pendidikan, Y_1 adalah APS 7-12 tahun, Y_2 adalah APS 13-15 tahun, Y_3 adalah APS 16-18 tahun, dan Y_4 adalah APS 19-24 tahun.

2. Model Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APK

APK terdiri 4 (empat) kelompok yaitu:

$$Y_5 = C + \beta X \dots\dots\dots(6)$$

$$Y_6 = C + \beta X \dots\dots\dots(7)$$

$$Y_7 = C + \beta X \dots\dots\dots(8)$$

$$Y_8 = C + \beta X \dots\dots\dots(9)$$

Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni

Dengan X adalah anggaran fungsi pendidikan, Y_5 adalah APK SD/MI, Y_6 adalah APK SMP/MTs, Y_7 adalah APK SM/MA, dan Y_8 adalah APK PT19-24 tahun.

3. Model Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APM

APM terdiri 4 (empat) kelompok yaitu:

$$Y_9 = C + \beta X \dots\dots\dots(10)$$

$$Y_{10} = C + \beta X \dots\dots\dots(11)$$

$$Y_{11} = C + \beta X \dots\dots\dots(12)$$

$$Y_{12} = C + \beta X \dots\dots\dots(13)$$

Dengan X adalah anggaran fungsi pendidikan, Y_9 adalah APM SD/MI, Y_{10} adalah APM SMP/MTs, Y_{11} adalah APM SM/MA, dan Y_{12} adalah APM PT19-24 tahun.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data belanja fungsi pendidikan sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu APS, APKS, dan APM (Tabel 1)

Tabel 1. Data Belanja, APK, APM, dan APS

TAHUN	Belanja Fungsi Pendidikan (Rp Miliar)	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				Angka Partisipasi Murni (APM) (%)				Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)			
		SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT 19-24 th	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA	PT 19-24 th	APS 7-12 th	APS 13-15 th	APS 16-18 th	APS 19-24 th
2005	29.307,9	106,63	82,09	55,21	11,06	93,25	65,37	43,50	8,71	97,14	84,02	53,86	12,23
2006	45.303,9	109,96	81,87	56,69	12,16	93,54	66,52	43,77	8,87	97,39	84,08	53,92	11,38
2007	50.843,4	110,35	82,03	56,71	13,31	93,75	66,64	44,56	9,64	97,60	84,26	54,61	12,20
2008	55.298,0	109,41	81,38	57,42	14,42	93,99	66,98	44,75	10,07	97,83	84,41	54,70	12,43
2009	84.919,5	110,35	81,09	62,37	14,59	94,37	67,40	45,06	10,30	97,95	85,43	55,05	12,66
2010	90.818,3	111,63	80,35	62,53	16,35	94,72	67,62	45,48	11,01	97,97	86,11	55,83	13,67
2011	97.854,0	102,42	89,37	64,10	18,06	90,98	68,22	47,93	12,56	97,53	87,79	57,69	14,47
2012	105.207,5	104,23	89,29	68,45	18,85	92,47	70,82	51,77	13,48	97,94	89,61	61,30	15,94
2013	119.604,2	107,63	85,69	66,27	23,06	95,52	73,73	54,12	18,08	98,34	90,62	63,64	20,04
2014	126.314,7	108,78	88,43	73,95	25,76	96,37	77,43	59,24	20,18	98,83	94,32	70,13	22,74
2015	146.134,8	109,94	90,63	77,39	20,89	96,20	77,45	59,46	17,34	98,57	94,25	70,26	22,77
2016	131.974,0	109,20	89,98	80,44	23,44	96,71	77,89	59,85	17,91	98,98	94,79	70,68	23,80
2017	138.507,3	108,43	90,00	82,25	25,00	97,14	78,30	60,19	18,62	99,08	94,98	71,20	24,67
2018	145.941,7	108,48	91,23	80,11	25,12	97,48	78,75	60,53	18,59	99,11	95,23	71,82	24,29
2019	155.160,2	107,36	90,20	79,94	25,13	97,58	79,35	60,70	18,85	99,17	95,43	71,92	23,28
2020	155.113,1	105,97	88,94	78,61	25,50	97,65	80,02	61,03	19,32	99,21	95,52	71,44	22,53
2021	162.345,9	105,79	85,86	80,17	26,09	97,72	80,47	61,47	19,59	99,12	95,85	70,74	23,28
2022	160.139,7	106,14	87,76	80,17	26,30	97,78	80,82	61,73	20,84	99,01	95,81	72,88	26,46

Sumber: LKPP dan BPS, data diolah (2023)

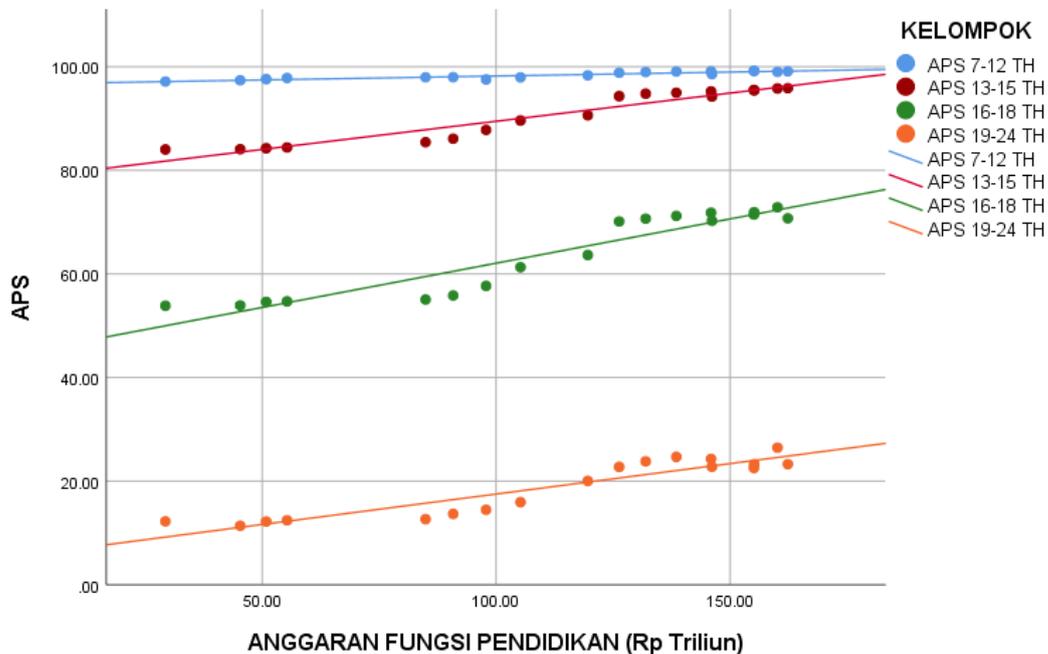
Adapun hasil analisis data diberikan sebagai berikut yaitu:

- a. Analisis Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap APS
 Analisis pengaruh anggaran fungsi Pendidikan terhadap APS menggunakan model regresi dengan hasil diberikan dalam Tabel 2 dan Gambar 3.

Tabel 2. Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APS

Variabel	APS 7-12 th	APS 13-15 th	APS 16-18 th	APS 19-24 th
	$R^2 = 0,870$ $n = 36$	$R^2 = 0,927$ $n = 36$	$R^2 = 0,887$ $n = 36$	$R^2 = 0,867$ $n = 36$
	$P = 0,000$	$P = 0,000$	$P = 0,000$	$P = 0,000$
	$\beta = 0,015$	$\beta = 0,109$	$\beta = 0,171$	$\beta = 0,118$
Anggaran Fungsi Pendidikan	$P = 0,000$	$P = 0,000$	$P = 0,000$	$P = 0,001$
	$C = 96,676$	$C = 78,604$	$C = 44,989$	$C = 5,761$

Sumber: Hasil analisis (2023)



Gambar 3. Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APS

Sumber: Hasil analisis (2023).

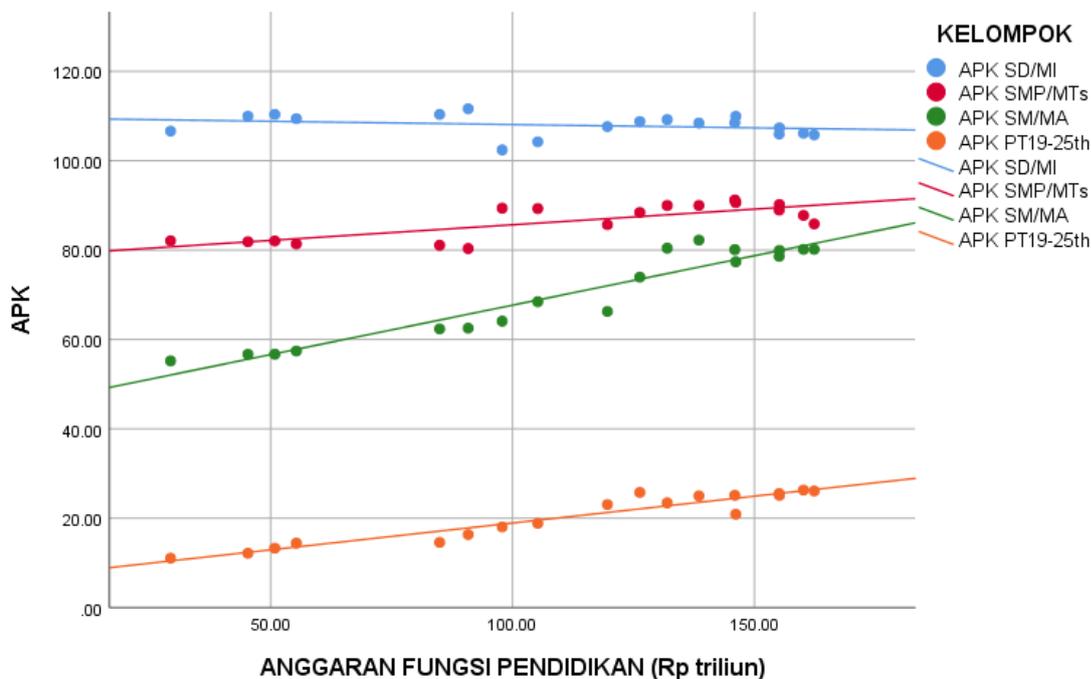
Dari Tabel 2 dan Gambar 3 diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun, dan APS 19-24 tahun.
 - 2) Setiap peningkatan anggaran fungsi Pendidikan sebesar Rp1 triliun diestimasi meningkatkan APS 7-12 tahun sebesar 0,02 persen, APS 13-15 tahun sebesar 0,11 persen, APS 16-18 tahun sebesar 0,17 persen, dan APS 19-24 tahun sebesar 0,12 persen.
 - 3) Koefisien variabel terendah pada APS 7-12 tahun dengan koefisien 0,02.
 - 4) Koefisien determinasi terendah pada APS 19-24 tahun sebesar 86,7 persen. Sedangkan sisanya sebesar 13,3 persen dipengaruhi faktor lain.
- b. Analisis Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap APK
- Analisis pengaruh anggaran fungsi Pendidikan terhadap APK menggunakan model regresi dengan hasil diberikan dalam Tabel 3 dan Gambar 4.

Tabel 3. Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APK

Variabel	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APK SM/MA	APK PT19-24th
	$R^2 = 0,601$ $n = 36$	$R^2 = 0,895$ $n = 36$	$R^2 = 0,946$ $n = 36$	$R^2 = 0,981$ $n = 36$
Anggaran Fungsi Pendidikan	$P = 0,000$ $\beta = 0,847$	$P = 0,000$ $\beta = 0,689$	$P = 0,000$ $\beta = 0,580$	$P = 0,000$ $\beta = 0,175$

Sumber: Hasil analisis (2023).



Gambar 4. Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APK

Sumber: Hasil analisis (2023).

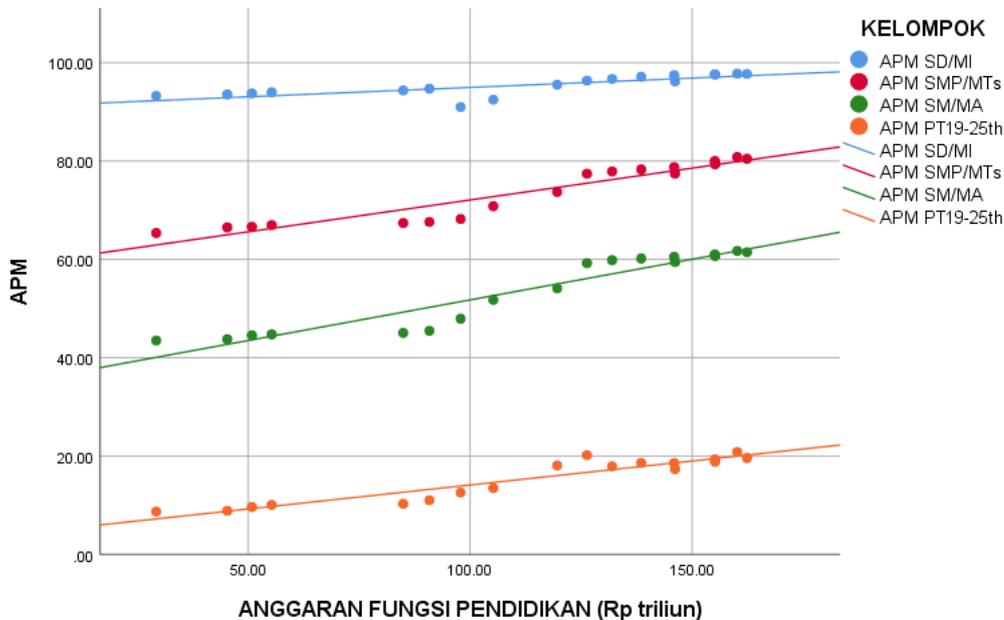
Dari Tabel 3 dan Gambar 4 diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SM/MA, dan APK PT 19-24 tahun.
 - 2) Setiap peningkatan anggaran fungsi Pendidikan sebesar Rp 1 triliun diestimasi meningkatkan APK SD/MI sebesar 0,84 persen, APK SMP/MTs sebesar 0,68 persen, APK SM/MA sebesar 0,58 persen, dan APK PT19-24 tahun sebesar 0,175 persen.
 - 3) Koefisien variabel terendah pada APK PT 19-24 tahun sebesar 0,175 persen.
 - 4) Koefisien determinasi terendah pada APK SD/MI sebesar 60,1 persen. Sedangkan sisanya sebesar 39,9 persen dipengaruhi faktor lain.
- c. Analisis Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap APM
- Analisis pengaruh anggaran fungsi Pendidikan terhadap APS menggunakan model regresi dengan hasil diberikan dalam Tabel 4 dan Gambar 5.

Tabel 4. Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APM

Variabel	APM SD/MI	APM SMP/MTs	APM SM/MA	APM PT19-24th
	$R^2 = 0,625$ n = 36	$R^2 = 0,906$ n = 36	$R^2 = 0,905$ n = 36	$R^2 = 0,839$ n = 36
	$P = 0,000$ $\beta = 0,038$	$P = 0,000$ $\beta = 0,130$	$P = 0,000$ $\beta = 0,165$	$P = 0,000$ $\beta = 0,098$
Anggaran Fungsi Pendidikan	$P = 0,000$ $C = 91,169$	$P = 0,000$ $C = 59,147$	$P = 0,000$ $C = 35,244$	$P = 0,000$ $C = 4,373$

Sumber: Hasil analisis (2023)



Gambar 5. Hubungan Anggaran Fungsi Pendidikan dan APM

Sumber: Hasil analisis (2023).

Dari Tabel 4 dan Gambar 5 diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM SM/MA, dan APM PT 19-24 tahun.
- 2) Setiap peningkatan anggaran fungsi Pendidikan sebesar Rp 1 triliun diestimasi meningkatkan APM SD/MI sebesar 0,03 persen, APM SMP/MTs sebesar 0,13 persen, APM SM/MA sebesar 0,16 persen, dan APM PT 19-24 tahun sebesar 0,09 persen.
- 3) Koefisien variabel terendah pada APM SD/MI sebesar 0,03 persen.

Koefisien determinasi terendah pada APM SD/MI sebesar 62,5 persen. Sedangkan sisanya sebesar 37,5 persen dipengaruhi faktor lain.

2. Pembahasan

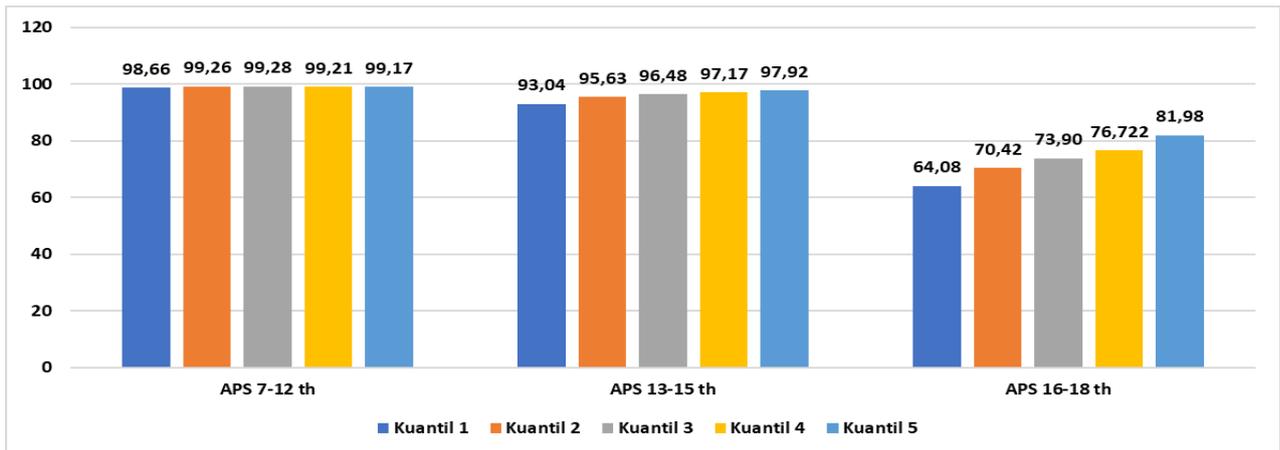
Anggaran fungsi pendidikan terhadap APS, APK, dan APM secara agregat berpengaruh positif dan signifikan. Artinya setiap peningkatan anggaran fungsi pendidikan, maka anggaran tersebut diestimasi meningkatkan APS, APK, dan APM. Meskipun anggaran fungsi pendidikan dapat meningkatkan APS, APK, dan APM, namun besaran pengaruhnya tersebut berbeda-beda.

a. Anggaran Fungsi Pendidikan dan Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa setiap peningkatan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp1 triliun diestimasi meningkatkan APS 7-12 tahun sebesar 0,02 persen, APS 13-15 tahun sebesar 0,11 persen, APS 16-18 tahun sebesar 0,17 persen, dan APS 19-24 tahun sebesar 0,12 persen. Artinya anggaran fungsi pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap APS secara keseluruhan. Pengaruh anggaran fungsi pendidikan tertinggi pada APS 16-18 tahun dan terendah pada APS 7-12 tahun. Sedangkan Koefisien determinasi terendah pada APS 19-24 tahun sebesar 86,7 persen. Koefisien determinasi ini juga menunjukkan bahwa anggaran fungsi pendidikan masih rendah pengaruhnya untuk mendorong peningkatan APS 19-24 tahun. Hal ini terbukti dengan semakin kecilnya angka partisipasi sekolah seiring bertambahnya umur atau usia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah belum fokus pada peningkatan APS 19-24 tahun. Hal ini menjadi wajar mengingat pemerintah masih fokus dalam program wajib belajar dari awalnya 9 tahun menjadi 12 tahun. Hal ini akan berimplikasi pada anggaran yang dialokasi untuk pendidikan sampai dengan jenjang SMA/ sederajat. Dengan meningkatkan jenjang pendidikan, maka biaya pendidikan juga cenderung meningkat. Namun, peningkatan perekonomian masyarakat belum tentu sejalan dengan kebutuhan peningkatan biaya pendidikan. dengan kata lain, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor rendahnya APS 19-24 tahun. Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa penelitian diantaranya yaitu Khairunnisa et al. (2014) faktor yang memengaruhi angka partisipasi sekolah yaitu PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pendidikan kepala rumah tangga, dan rasio sekolah terhadap murid. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) Tingkat PDRB per kapita mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat yang salah satunya untuk membiayai pendidikan. Setiap peningkatan PDRB per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan APS sekitar 22,24 persen. 2) Pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap partisipasi sekolah usia 13–15 tahun. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang berpendidikan di atas SMP semakin besar kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. 3) Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap APS SMP. Peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan nilai APS sebesar 0,19%. Kemudian hasil penelitian Rambey (2022) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga terhadap tingkat pendidikan anak.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran ekonomi keluarga begitu memengaruhi terhadap APS. Namun faktanya, tingkat ketimpangan ekonomi juga menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya umur (Gambar 6).



Gambar 6. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2022
 Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2022

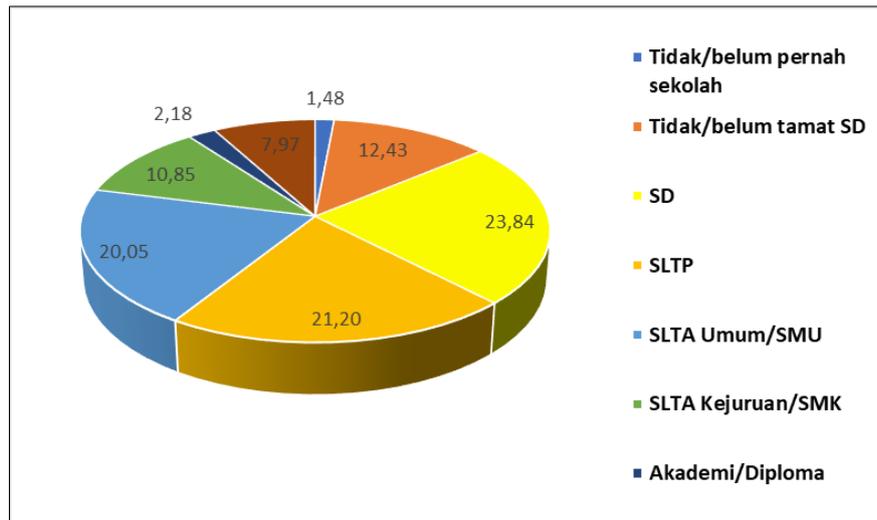
Perbedaan kuantil 1 dan kuantil 5 pada APS 7-12 tidak begitu tampak ketimpangan ekonominya, karena perbedaannya hanya 0,51. Namun, perbedaan kuantil 1 dan kuantil 5 pada APS 13-15 dan 16-18 perbedaannya lebih dari 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi begitu meningkat seiring bertambahnya umur. Kondisi ini menjelaskan bahwa terdapat persoalan rendahnya ekonomi keluarga menyebabkan nilai APS pada APS lebih dari 15, lebih rendah. Rendahnya ekonomi keluarga ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Menurut Amalia et al. (2018), ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan pada masyarakat (Tabel 5).

Tabel 5. Hubungan Pendidikan dan Kesejahteraan

Tingkat Pendidikan	Tingkat Kesejahteraan (Rp)		
	0 - 1.500.000	1.500.000 -2.500.000	2.500.000-3.500.000
Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	5		1
SD	6		13
SMP	7		6
SMA	27		5
Diploma/Sarjana	9		21

Sumber: Amalia et al., 2018.

Dengan demikian pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya apabila kepala rumah tangga yang masih banyak berpendidikan rendah, maka APS juga berpotensi rendah. Hal ini terkonfirmasi dari hasil penelitian bahwa APS semakin menurun seiring bertambahnya umur. APS yang tinggi baru pada umur 7-12 tahun, sedangkan APS setelah 12 tahun sampai 24 tahun terus menurun. Kondisi ini juga terkonfirmasi bahwa kepala rumah tangga yang tercermin dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, masih didominasi lulusan SD sebesar 23 persen per Agustus 2022 (Gambar 7).



Gambar 7. Persentase Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Sumber: BPS, 2022, diolah.

Dengan besarnya anggaran fungsi pendidikan seharusnya lulusan SD tidak mendominasi karena anggaran tersebut diprioritaskan pada jenjang wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut berarti masyarakat paling tidak lulus pada jenjang SMP. Namun, faktanya lulusan SD masih mendominasi. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah terhadap implementasi anggaran fungsi pendidikan.

Kemudian secara agregat kemampuan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang tercermin dari angka kemiskinan. Menurut data BPS per September 2022, angka kemiskinan lebih tinggi pada pedesaan dengan angka kemiskinan sebesar 12,36 persen dibandingkan perkotaan dengan angka kemiskinan sebesar 7,53 persen. Dengan demikian, APS pada pedesaan tentunya lebih rendah dibandingkan APS perkotaan. Hal ini terkonfirmasi APS menurut klasifikasi wilayah, bahwa APS perkotaan lebih tinggi dibandingkan APS pedesaan. Perbedaan tersebut makin tampak seiring bertambahnya umur atau meningkatnya jenjang pendidikan.

b. Anggaran Fungsi Pendidikan dan Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK)

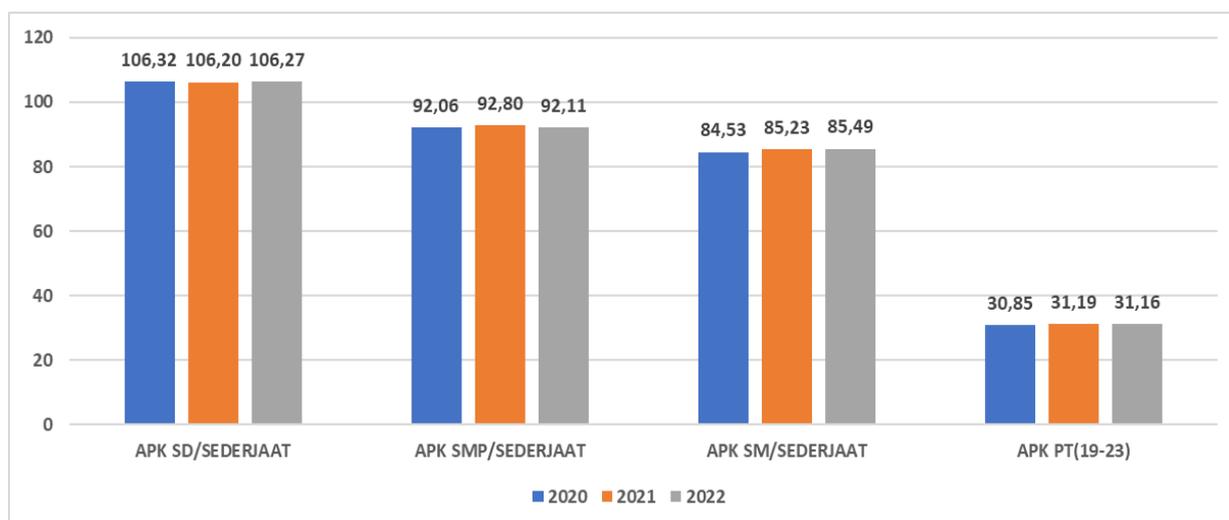
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa setiap peningkatan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp1 triliun diestimasi meningkatkan APK SD/MI sebesar 0,84 persen, APK SMP/MTs sebesar 0,68 persen, APK SM/MA sebesar 0,58 persen, dan APK PT 19-24 tahun sebesar 0,175 persen. Hasil koefisien variabel tersebut menunjukkan bahwa anggaran fungsi pendidikan berpengaruh semakin kecil seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, dengan APK terendah adalah PT 19-24 tahun. Karena APK ini merupakan suatu indikator yang menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu, maka APK menjadi program prioritas dari pemerintah (Tabel 6).

Tabel 6. Target Kinerja APK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63

Sumber: Kemendikbud, 2020

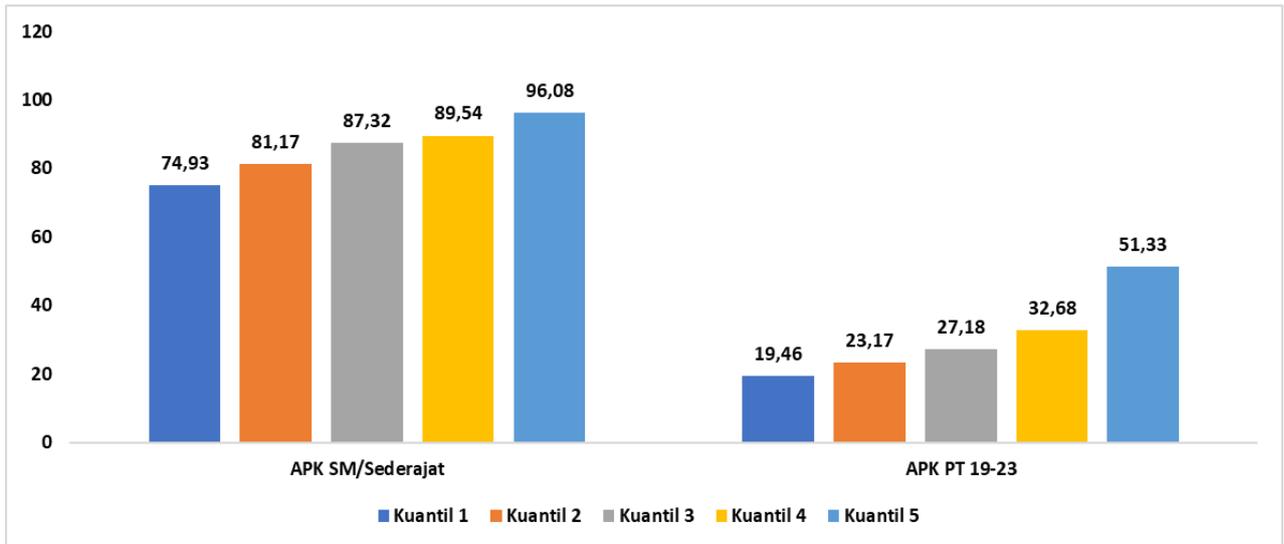
Capaian APK SD/MI selama periode 2020-2022 telah mencapai target, yaitu 106,27. Sedangkan APK lainnya masih di bawah target, khususnya APK SM/MA dan APK PT (Gambar 8).



Gambar 8. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 2020-2022

Sumber: BPS, 2022.

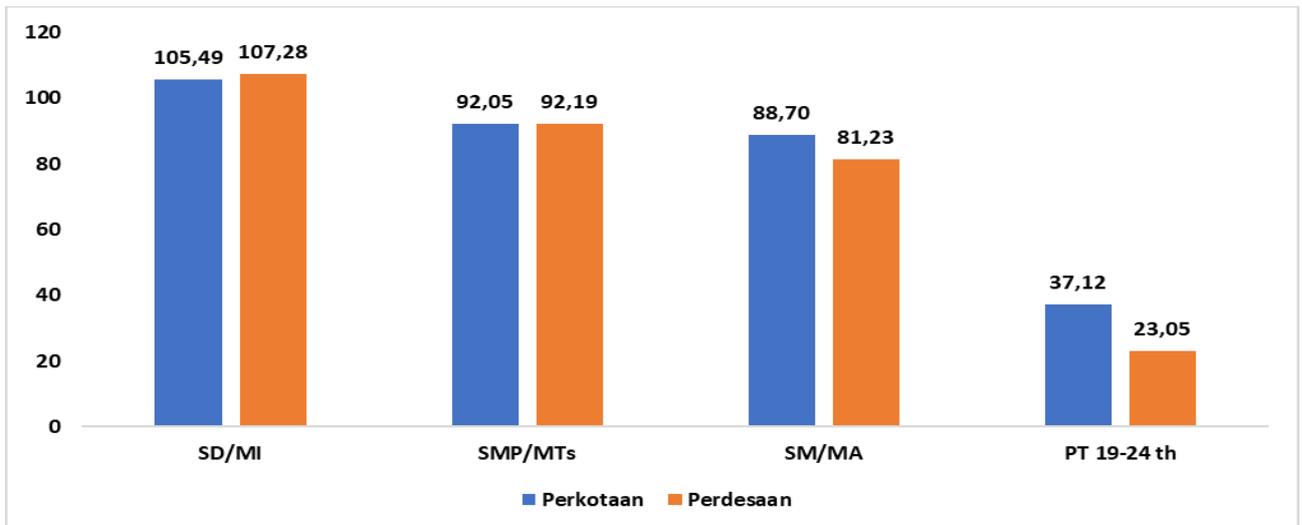
Rendahnya APK SM/MA dan APK PT 19-24 tahun juga dipengaruhi oleh PDRB per kapita. Hal ini karena adanya biaya langsung dan tidak langsung yang harus dipenuhi oleh kepala rumah tangga. Biaya langsung merupakan biaya kewajiban terhadap biaya-biaya sekolah seperti iuran SPP, seragam, dan kegiatan penunjang sekolah lainnya. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya transportasi peserta didik dari rumah ke sekolah dan biaya lainnya yang menunjang terlaksananya kegiatan sekolah. Apabila pendapatan masyarakat rendah, maka masyarakat akan sulit untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Namun faktanya meskipun anggaran fungsi pendidikan semakin meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi semakin lebar seiring meningkatnya jenjang pendidikan (Gambar 9).



Gambar 9. Angka Partisipasi Kasar Menurut Kelompok Pengeluaran, 2022

Sumber: BPS, 2022.

Kemudian perbandingan APK antara perkotaan dan pedesaan berbeda dengan APS. Apabila APS perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan pada APS pedesaan, tetapi pada APK tidak selalu APK perkotaan lebih tinggi. APK perkotaan hanya lebih tinggi pada jenjang SMA/MA dan PT 19-24 tahun. Sedangkan APK perkotaan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs lebih rendah dibandingkan pada APK pedesaan (Gambar 10),



Gambar 10. APK Menurut Klasifikasi Wilayah

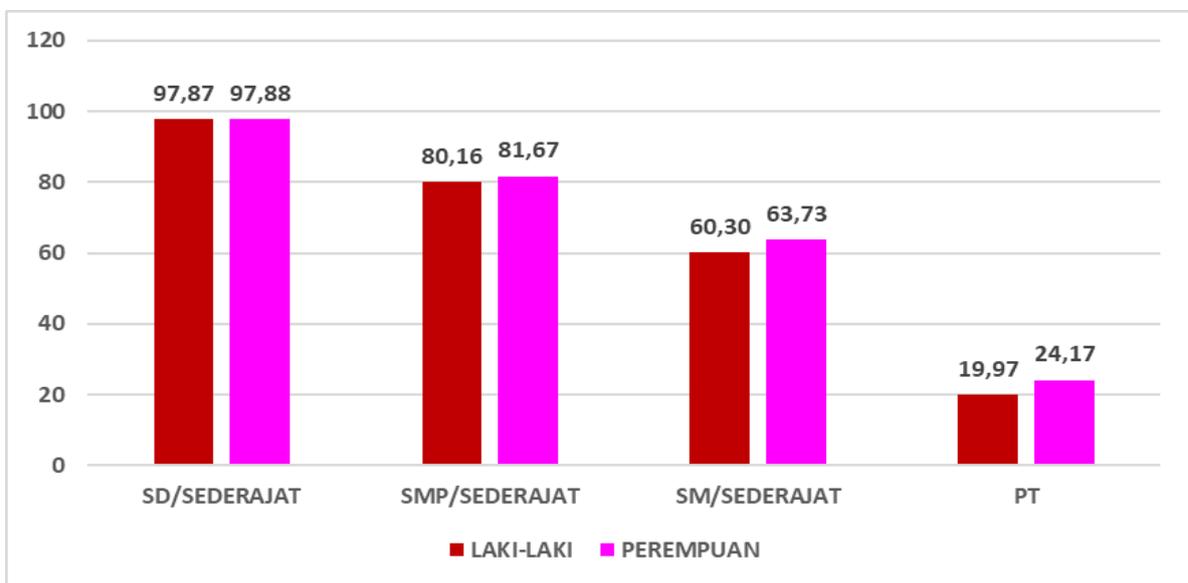
Sumber: BPS, 2022, diolah.

c. Anggaran Fungsi Pendidikan dan Indikator Angka Partisipasi Murni (APM)

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa setiap peningkatan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 1 triliun, diestimasi meningkatkan APM SD/MI sebesar 0,04 persen, APM SMP/MTs sebesar 0,13 persen, APM SM/MA sebesar 0,17 persen, dan APM PT 19-24 tahun sebesar 0,09 persen. APM ini merupakan indikator yang mengukur ketepatan waktu sekolah. Sehingga APM tidak menjadi agenda prioritas nasional. Menurut BPS (2022), indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan. Indikator APM jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diperhitungkan sebagai

bagian dari target 4.5, yaitu pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan (BPS, 2022).

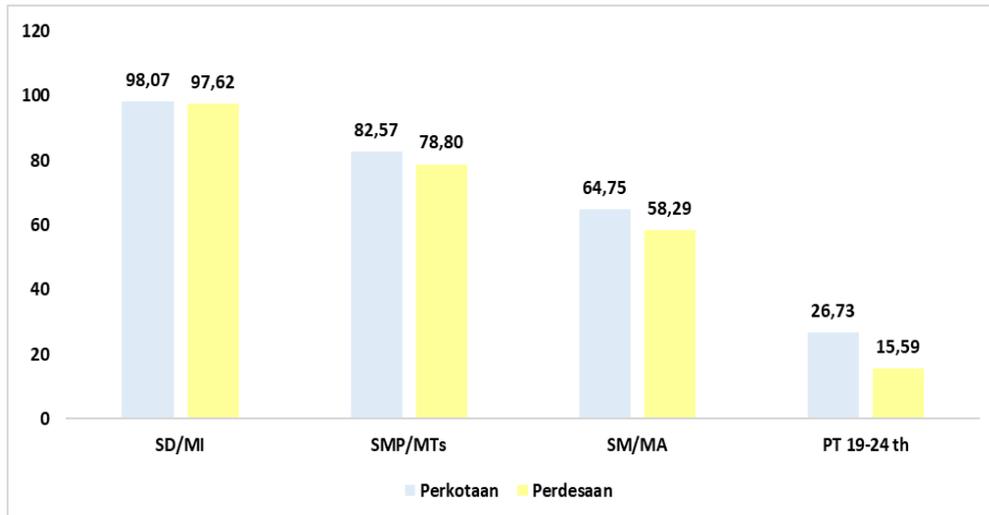
Disparitas gender dalam pendidikan merupakan upaya pemerintah memberikan pemerataan pendidikan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan. Hal ini merupakan mandat dari Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Menurut data BPS, disparitas APM pada jenjang SD/MI tidak tampak ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pada jenjang SMP/MTs, SM/MA, dan PT 19-24 tahun, APM Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 11).



Gambar 11. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik, 2022

Sumber: BPS, 2022.

Kemudian perbandingan APM antara perkotaan dan perdesaan sama halnya dengan APS. APM pada perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan APM perdesaan (Gambar 12). Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat perkotaan lebih tinggi pemahamannya terhadap ketepatan waktu anak untuk mengenyam pendidikan.



Gambar 12. APM Menurut Klasifikasi Wilayah

Sumber: BPS, 2022, diolah.

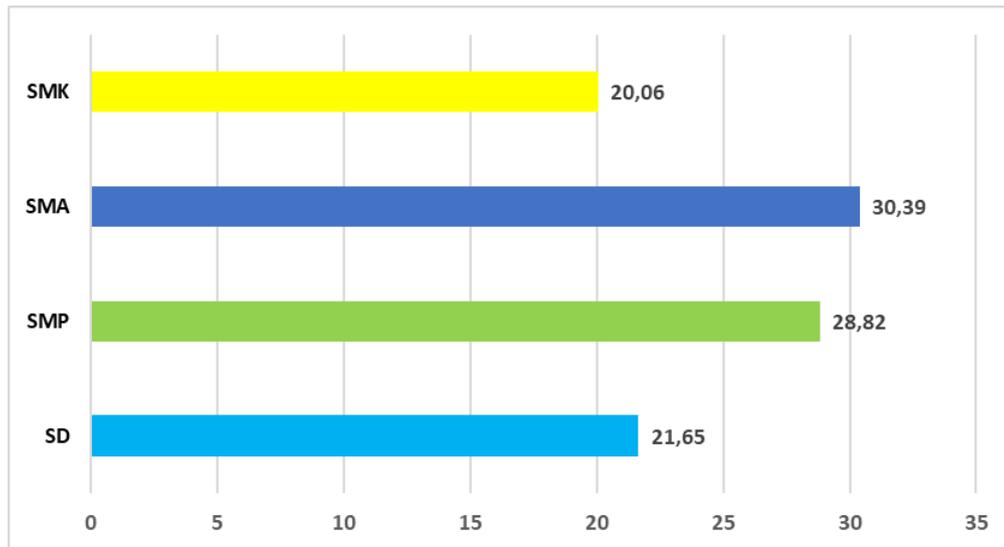
Peningkatan ketiga indikator tersebut merupakan tujuan pembangunan nasional dalam hal ini sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan mandat dari alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pendidikan khususnya akses pendidikan.

Salah satu akses pendidikan tersebut yang menjadi perhatian pemerintah yaitu sarana dan prasarana. Menurut Pasal 1 Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menyebutkan bahwa sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Sedangkan prasarana dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan meliputi lahan, bangunan, ruang.

Sarana dan prasarana tidak lepas dari indikator rombongan belajar (rombel) terhadap ketersediaan kelas. Menurut Pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

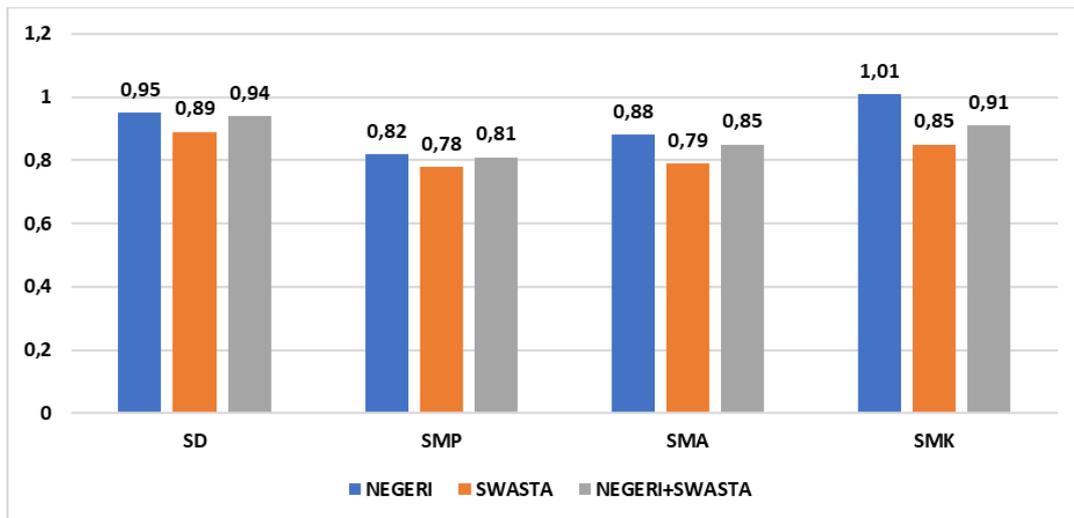
- 1) SD/ sederajat berjumlah paling sedikit 6 dan paling banyak 24 rombel.
- 2) SMP/ sederajat berjumlah paling sedikit 3 dan paling banyak 33 rombel.
- 3) SMA/ sederajat berjumlah paling sedikit 3 dan paling banyak 36 rombel.
- 4) SMK/ sederajat berjumlah paling sedikit 6 dan paling banyak 72 rombel.

Capaian rasio peserta didik per rombel tahun ajaran 2021/2022 telah berhasil memenuhi standar rombel dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 (Gambar 13).



Gambar 13. Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022
 Sumber: Statistik Pendidikan BPS, 2022.

Kemudian rasio rombel yang mencerminkan jumlah rombel sama dengan jumlah kelas juga mencapai kriteria ideal yaitu angka rasio rombel per kelas di bawah satu. Semua jenjang pendidikan nilai rasio rombel per kelas masih di bawah 1, kecuali jenjang pendidikan SMK sebesar 1,01. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kelas untuk rombel SMK mengalami kekurangan.



Gambar 14. Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022
 Sumber: Statistik Pendidikan BPS, 2022.

Berdasarkan Gambar 15 di atas, maka sarana dan prasarana pendidikan secara nasional telah memenuhi kebutuhan peserta didik. Meskipun ketersediaan telah memenuhi kebutuhan, tetapi kualitas sarana dan prasarana masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada tahun 2020, kualitas sarana dan prasarana kelas mengalami peningkatan perbaikan, tetapi pada tahun 2022 kualitas kelas menurun pada keseluruhan jenjang pendidikan (Tabel 7).

Tabel 7. Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi

Jenjang Pendidikan	2019/2020			2020/2021			2021/2022		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat
SD	13,59	78,79	7,63	42,86	57,13	0,01	39,39	60,60	0,01
SMP	17,13	77,53	5,35	49,83	50,56	0,01	46,70	53,30	0,00
SMA	27,1	70,20	2,70	57,13	42,87	0,00	54,97	45,03	0,00
SMK	29,88	68,62	1,50	57,04	42,96	0,00	54,74	45,23	0,03
	21,925	73,785	4,295	51,715	48,38	0,005	48,95	51,04	0,01

Sumber: BPS, 2022.

Meningkatnya ruang kelas menjadi rusak ringan berdampak pada kenyamanan belajar peserta didik. Sehingga hal tersebut memengaruhi konsentrasi belajar peserta didik (Andrianto, 2020). Selain kondisi ruang kelas, sanitasi pada jenjang SD dan SMK masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena persentase sanitasi pada jenjang SD dan SMK masih di bawah 70 persen. Kondisi tersebut menunjukkan sinyal negatif dukungan anggaran sarana dan prasarana pendidikan, mengingat anggaran fungsi pendidikan terus mengalami peningkatan. Belanja fungsi pendidikan selama periode 2019-2022 terus mengalami peningkatan, dari Rp155.113,10 miliar tahun 2019 menjadi Rp160.139,70 miliar pada tahun 2022. Kualitas sarana dan prasarana merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan dukungan anggaran pada perbaikan sarana dan prasarana pada jenjang SD dan SMK untuk sanitasi. Sedangkan kondisi ruang kelas diprioritaskan pada daerah yang memiliki jumlah persentase kondisi ruang kelas rusak ringan yang tertinggi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS, APK, dan APM. Pada APS ketimpangan ekonomi begitu meningkat seiring bertambahnya umur.
2. Capaian APK selama periode 2020-2022 baru APK SD/MI mencapai target, yaitu 106,27. Sedangkan APK lainnya masih di bawah target, khususnya APK SM/MA dan APK PT.
3. Disparitas APM pada jenjang SD/MI tidak tampak ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan Perempuan. Bahkan pada jenjang SMP/MTs, SM/MA, dan PT 19-24 tahun, APM Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian perbandingan APM antara perkotaan dan perdesaan sama halnya dengan APS. APM pada perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan APM perdesaan.

Upaya pemerintah meningkatkan APS, APK, dan APM yaitu dengan meningkatkan beasiswa bagi anak keluarga yang tidak mampu. Beasiswa tersebut bukan hanya pada kebutuhan sekolah tetapi beasiswa juga diberikan untuk kebutuhan tidak langsung seperti biaya transportasi. pemerintah perlu memprioritaskan dukungan anggaran pada perbaikan sarana dan prasarana pada jenjang SD dan SMK untuk sanitasi. Sedangkan kondisi ruang kelas diprioritaskan pada daerah yang memiliki jumlah persentase kondisi ruang kelas rusak ringan yang tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. (2017). Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia. *Jurnal Dharmasiswa*, 1(2), 827.
- Andrianto. (2020). Pengaruh Kondisi Ruang Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Pdtm Di Smk Negeri 5 Padang. *Jurnal Vokasi Mekanika*, 2(4), 1.
- Arifah, Umu. (2018). Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan. *Journal Cakrawala*, 2(1), 56.
- Arwildayanto, Lamatenggo, Nina, dan Sumar, warni Tune. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: WidyaPadjadjaran.
- Amalia,Lolita Noor, Sukamti,Sri, Isnaini,Ifa, dan Aini,Ela Nur . (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1), 58.
- Bakti Toni Endaryono dan Tjipto Djuhartono. (2017). Indikator Pembangunan Pendidikan Untuk Masyarakat Berkelanjutan Dengan Pendidikan Berkarakter di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(3), 306.
- BPK. (2022). *LKPP Periode Tahun 2005-2022*. Jakarta: BPK.
- BPS. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2023 BPS, Susenas Maret 2019-2022
- BPS. (2023). Partisipasi Pendidikan Formal. Di akses dari <https://www.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab2>, tanggal 18 Oktober 2023.
- Dwianto,Ridho,Syapsan, dan Ekwaro,Hendro. (2020). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Pendidikan Pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Manusia Sektor Pendidikan Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1005-1019.
- Farida,Isna, Suhaili,Muhammad, dan Fatah,Abdul. (2021). Analisis Indikator Pendidikan: Partisipasi Pendidikan di Indonesia Periode 1994-2018. *Jurnal Kependidikan*, 7(3), 561.
- Hayati, Banatul dan Rutfiana, ririh Tia. (2020). Analisis Pengaruh Pemberian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 9(2), 41-55.
- Kemendikbud. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Khairunnisa et al. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *JEPI*, 15(1), 91-112.
- Muhammad Fahmi. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 213.
- Permendikbud Ristekdikti Nomor 22 Tahun 2023.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Pratiwi, Friska Amelia. (2018). Indikator Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.

Prianty, Feti dan Fathony, Aditya Achmad. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1-12.

Rambey, Mara Jurdan. (2022). Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Desa Sihaborgoan Barumun. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 5(1), 1.

Rohman, Abdul dan Ferina, Ika Sasti. (2015). Pengaruh Belanja Pendidikan, Ekonomi, Dan Pelayanan Umum Terhadap Partisipasi Sekolah Diprovinsi Sumatera Selatan. *Majalah Ilmiah Sriwijaya*, 20(12), 44-55.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wakhid, Abdul. (2020). Konsep Penganggaran Biaya Pendidikan. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(6), 204.